



LAPORAN KINERJA

TAHUN
2022



**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MERDEKA
BELAJAR**



Identifikasi
Refleksi
Benahi

PENGANTAR

Assalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Dari aspek peraturan, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Peraturan ini, BPMP Provinsi Sumatera Selatan membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, diharapkan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat diukur dan dinilai oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang ingin memperoleh gambaran mengenai hasil penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, Januari 2023

Kepala,



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP 197511252005011002

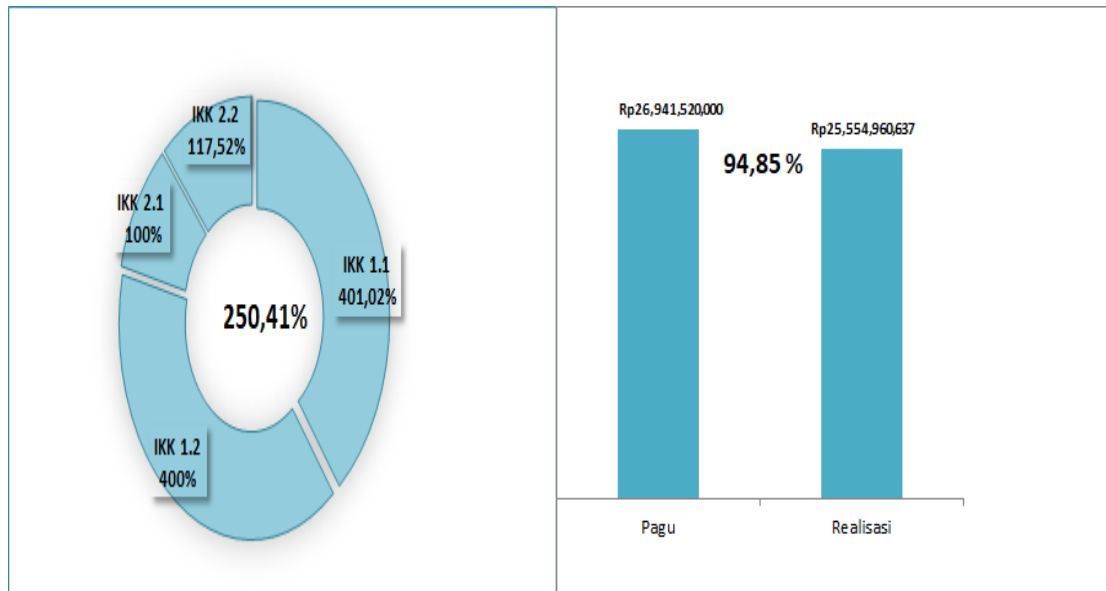
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan pencapaian dua sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Semua program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Kinerja Jangka Menengah (RKJM) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran kegiatan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan data yang ada, pada rentang tahun 2015-2020, kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki *trend* yang terus meningkat, sementara serapan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki *trend* yang kurang lebih sama, *fluktuatif*.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2022 persentase capaian kinerja fisik dan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan sebesar 250,41% dan penyerapan anggaran sebesar 94,85% sebagai berikut.

Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022

Penyerapan Anggaran Tahun 2022



Laporan ini juga memuat hasil capaian kinerja yang diukur melalui 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur keberhasilan dari 2 Sasaran Kegiatan, dengan rangkuman sebagai berikut.

Output	Target, Realisasi, Capaian Kinerja	Tahun		
		2022	2023	2024
1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan				
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Target	0.98	1.96	3.92
	Realisasi	3.93		
	Capaian Kinerja	401.02%		
IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Target	25	30	35
	Realisasi	100		
	Capaian Kinerja	400%		
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel				
IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target	A	A	A
	Realisasi	A		
	Capaian Kinerja	100%		
IKK2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target	83	84	85
	Realisasi	97.54		
	Capaian Kinerja	117.52%		

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian 2 sasaran kegiatan dan 4 indikator kinerja kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 telah mencapai target. Ada IKK yang mencapai target 100%, beberapa IKK lainnya mencapai target lebih dari 100%.

Capaian kinerja yang telah mencapai target tidak lepas dari berbagai langkah antisipasi dan mitigasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul selama pelaksanaan penjaminan mutu. Upaya itu antara lain adalah:

1. Melakukan advokasi percepatan pengumpulan data mutu satuan pendidikan;
2. Mengutamakan skala prioritas penugasan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang berasal dari program internal;
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh ekosistem pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi dan konsultasi BPMP ke unit utama untuk dapat mengakses ragam *platform* digital untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Kemdikbudristek;
5. Optimalisasi, kolaborasi, dan pendampingan melekat terkait pemanfaatan ragam *platform* digital dengan satuan pendidikan yang memerlukan intervensi khusus.

Faktor pendukung terpenuhinya capaian kinerja IKK 2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yaitu renstra dan perjanjian kinerja;
2. Kegiatan penyusunan rencana kinerja tahunan dan rencana kerja aksi;
3. Kegiatan revaluasi renstra;
4. Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan;
5. Kegiatan pengukuran kinerja per triwulan, dan
6. Kegiatan penyusunan laporan kinerja.

Untuk perbaikan ke depan masih terdapat faktor penyebab yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan untuk meningkatkan pencapaian nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor penyebab itu antara lain:

1. Satker perlu memastikan dokumen SKP yang diunggah telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai; SKP menggambarkan hubungan berkesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) dibuktikan dengan disusunnya matriks peran hasil;
2. Satker perlu memberikan informasi mengenai tata cara pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi).

Pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 besarnya adalah Rp26.941.520.000. Dari jumlah tersebut, anggaran yang telah direalisasikan senilai Rp25.554.960.637 dengan daya serap anggaran sebesar 94,85%.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2022 sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Isu Strategis.....	5
E. Peran Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	8
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	8
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah.....	9
D. Perjanjian Kinerja	10
E. Program Prioritas.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Capaian Anggaran	28
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	29
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan	3
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan	8
Tabel 2.2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan	8
Tabel 2.3	Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan	9
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Awal BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	10
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Akhir BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	11
Tabel 3.1	Data Akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022.....	16
Tabel 3.2	Hasil Perhitungan IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	16
Tabel 3.3	Data Akreditasi Satuan Dikdas dan Dikmen Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	20
Tabel 3.4	Data Akreditasi Satuan Dikdas dan Dikmen Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	20
Tabel 3.5	Perhitungan Nilai IKK 1.2 Berdasarkan Kenaikan Mutu Pembelajaran Prov/Kab/Kota tahun 2021 dan 2022	21
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan	2
Gambar 1.2	Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan	2
Gambar 3.1	Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	14
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Capaian IKK 1.1 Tahun 2022	15
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2020 (Baseline), 2022, dan Renstra 2024	16
Gambar 3.4	Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 Tahun 2022	19
Gambar 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2022 dan Target Akhir Renstra 2024	22
Gambar 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2022 dan Target Akhir Renstra 2024	25
Gambar 3.7	Tingkat Implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2021, dan 2022	25
Gambar 3.8	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	27
Gambar 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2022 dan Target Akhir Renstra 2024	27



A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan satuan kerja/unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. BPMP Provinsi Sumatera Selatan pertama kali dibentuk pada tanggal 21 Januari 1984 dengan nama Balai Penataran Guru (BPG) Palembang. BPG Palembang kemudian mengalami beberapa perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi mengikuti perubahan peraturan di tingkat kementerian, antara lain Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Regulasi terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pada saat ini BPMP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si., terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2022. BPMP Provinsi Sumatera Selatan wilayah kerjanya melingkupi wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau 17 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Profil BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.



A.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022, struktur BPMP terdiri atas Kepala, Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022

[illegible]

Gambar 1.2 Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan

A.2. Profil SDM

Secara keseluruhan jumlah pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2022 yaitu sebanyak 118 orang. Pegawai ini terdiri atas 83 orang PNS dan 35 orang Non PNS seperti yang tersaji pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Kedadaan	Jumlah	Keterangan
Status Kepegawaian:		
PNS	83 orang	-
Non PNS	35 orang	-
PNS berdasar Status Jabatan:		
Pimpinan Eselon III	1 orang	-
Pimpinan Eselon IV	1 orang	-
Jabatan Pelaksana	66 orang	-
Jabatan Fungsional	15 orang	12 Widyaprada, 2 Perawat, 1 Pustakawan
PNS berdasar Status Pendidikan:		
Doktor/ S3	2 orang	-
Magister/ S2	32 orang	-
Sarjana/ S1	27 orang	-
Sarjana Muda/ Diploma	3 orang	-
SMA	16 orang	
SMP	3 orang	
PNS berdasar Status Kepangkatan :		
Golongan IV	29 orang	
Golongan III	44 orang	
Golongan II	7 orang	
Golongan I	3 orang	
PNS berdasar Jenis Kelamin		
Laki-Laki	54 orang	
Perempuan	29 orang	

Sumber: Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Desember 2022

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PermenPAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PermenPAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendikbudristek RI Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Permendikbudristek RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Permendikbudristek RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Permendikbudristek RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Kepmendikbudristek RI Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Tugas dan Fungsi

C.1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

C.2. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, BPMP menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi.

D. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan atau isu strategis. Tantangan dan isu strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan, antara lain:

1. Angka partisipasi kasar (APK) belum optimal;
2. Kualitas pendidikan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah yang disparitasnya masih cukup tinggi;
3. Pemerataan akses pendidikan yang belum merata terutama untuk daerah/wilayah dengan kondisi geografis berupa perairan atau pegunungan;
4. Komitmen yang sudah baik dari dinas pendidikan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu;
5. Kapasitas SDM;
6. Rentang kendali dan jangkauan;
7. Keberagaman kapasitas sumber daya yang mendukung;

8. adanya program Merdeka Belajar dan sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data;
9. perlunya advokasi dan pendampingan asimetris kepada pemerintah daerah atau *stakeholder* lainnya;
10. perlunya kemitraan dengan pemerintah daerah atau *stakeholder* lainnya;
11. adanya regulasi/kebijakan tata kelola satuan pendidikan (BOS/BOP, DAK);
12. perlunya manajemen talenta ASN yang berkualitas dan berdaya saing.

Peran Strategis

BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam:

1. memastikan keterlaksanaan program dan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Provinsi Sumatera Selatan;
2. menyelaraskan regulasi pemerintah daerah terhadap pemerintah di bidang pendidikan dalam bentuk advokasi, pendampingan dan fasilitasi;
3. sinkronisasi program peningkatan mutu pendidikan pada pemerintah daerah dengan program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. sinergi dan kolaborasi antara BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah atau *stakeholder* lainnya;
5. peningkatan kompetensi dan partisipasi aktif ASN pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian kinerja organisasi.

Visi dan Misi BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Seperti diketahui, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan aspek penting dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar bagi berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025), Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 (RPJMN 2020-2025), dan Visi Indonesia 2045 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”;
- b. RPJPN 2005-2025 memiliki visi “...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI”;
- c. Dua dari sembilan misi presiden yaitu: “Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”;
- d. Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”; serta

Salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045, yaitu: “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Untuk mengawal dan menyemangati pencapaian visi dan misi di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan motto yakni “Tetap Melayani dengan HATI.” HATI merupakan akronim dari nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya pegawai yaitu Humanis, Amanah, Tanpa pamrih, dan berintegritas.

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan tujuan dan indikator kinerja tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	▪ Peningkatan mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan
	▪ Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA TUJUAN	▪ Meningkatnya mutu pembelajaran satuan pendidikan (PAUD Dikmas) di Provinsi Sumatera Selatan
	▪ Meningkatnya rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Selatan
	▪ Tercapainya SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan predikat memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
	▪ Tercapainya nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan RKAKL minimal 85

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

SASARAN KEGIATAN	▪ Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan
-------------------------	---

		Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel
INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA	- Meningkatnya persentase mutu pembelajaran pada satuan pendidikan (PAUD Dikmas) - Meningkatnya persentase rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Prov/Kab/Kota - Meningkatnya predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan - Meningkatnya nilai kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan



Rencana Kinerja Jangka Menengah

Rencana Kinerja Jangka Menengah BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 menetapkan target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
BPMP Provinsi Sumatera Selatan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Baseline	Target Kinerja			
		2020	2022	2023	2024	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan					
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	-	0,98	1,96	3,92	
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	-	25,00	30,00	35,00	
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	BB	A	A	A	
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	81	83	84	85	

Tujuan strategis sasaran kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan periode 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel.

D. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Sumatera Selatan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	83

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp21.210.263.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp4.954.998.000

Revisi perjanjian kinerja terjadi karena terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024 dan penyesuaian tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang diundangkan tanggal 29 Maret 2022.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Akhir BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	83

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp19.336.555.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp7.604.965.000



Program Prioritas

Untuk memenuhi Sasaran Kegiatan (SK) tersebut, program-program prioritas yang dilakukan BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Satuan PAUD, Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya
 - a. Pendampingan Fasilitas Berdasarkan SNP
 - Pendampingan Program Sekolah Penggerak
 - Perencanaan Berbasis Data
 - Advokasi Penerapan Kurikulum Merdeka
 - Pendampingan Asesmen Nasional (Dikdas dan Dikmen), dan Sulingjar (PAUD)
 - Pengembangan Kemitraan dan Implementasi Kebijakan Lintas Sektor
 - b. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan
 - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program Transfer Daerah
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - a. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)

Melakukan upaya dalam birokrasi dengan menyederhanakan struktur dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait agar tata kelola menjadi fleksibel dan efisien.
 - b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Melakukan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai sasaran (kinerja) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan dilakukan dalam upaya memberikan kontribusi memenuhi visi Presiden Republik Indonesia dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu “Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.



A. Capaian Kinerja

BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dua sasaran kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020–2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Kegiatan 1



Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 ayat 2 bahwa “Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu”. Bentuk penjaminan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 tertuang dalam target kinerja sasaran kegiatan berikut.



Gambar 3.1 Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

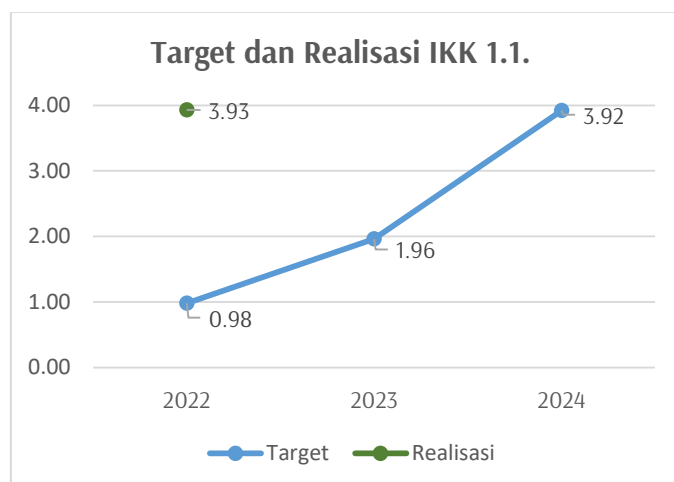
Hasil (*output*) penjaminan mutu pendidikan di atas bermuara pada peningkatan mutu pembelajaran satuan pendidikan PAUD dan dikmas, serta peningkatan nilai rapor pendidikan provinsi/kabupaten/kota pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.



IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Target, Realisasi dan Capaian

Target kinerja “Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya” pada Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 0,98% atau sebanyak 55 satuan pendidikan meningkat mutu pembelajarannya. Berdasarkan perhitungan persentase satuan PAUD dan dikmas di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar (pada tahun 2022 berdasarkan data akreditasi tahun 2021-2022) diperoleh realisasi sebesar 3,93% atau sebanyak 219 satuan pendidikan meningkat mutu pembelajarannya, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 401,02% yang berarti melampaui target renstra dan perjanjian kinerja tahun 2022, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.1 Tahun 2022

Nilai realisasi capaian IKK 1.1 sebesar 3,93% diperoleh berdasarkan data akreditasi tahun 2021-2022 yang bersumber dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP yang dilakukan perhitungan dengan rumus berikut.

$$IKK\ 1.1\ (\Delta) = \frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{total\ sekolah\ TA\ 2022} - \frac{(0,5 \times A_{21}) + (0,35 \times B_{21}) + (0,15 \times C_{21})}{total\ sekolah\ TA\ 2021}$$

Keterangan :

1. Δ : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2021 ke TA 2022 yang dilihat dari nilai akreditasi
2. A_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022
3. B_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022
4. C_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022
5. A_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2021
6. B_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2021
7. C_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2021

Data akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 Data Akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021 -2022**

Provinsi Sumatera Selatan	Data Akreditasi							
	A	B	Belum Terakreditasi	C	Terakreditasi	Tidak diisi	Tidak Terakreditasi	Jumlah Sekolah
Tahun 2022	71	1508	305	968	11	2703	8	5574
Tahun 2021	53	992	402	780	6	3339	5	5577
Catatan: Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember)								

Dengan memasukkan data akreditasi tersebut ke rumus perhitungan IKK 1.1 diperoleh nilai minimal B bobot tahun 2021-2022 dan nilai IKK 1.1 berikut.

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Provinsi Sumatera Selatan	Minimal B bobot
Tahun 2022	12,77
Tahun 2021	8,84
IKK 1.1 (Δ)	3,93



Gambar 3.3 Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2020 (Baseline), 2022, dan Renstra 2024

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK 1.1 adalah sebagai berikut:

1. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru
2. Pendampingan implementasi pedoman mitigasi resiko dan PHBS ke sekolah
3. Advokasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Implementasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi
4. Pendampingan Program Sekolah Penggerak (PSP).
5. Optimalisasi Program Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan
6. Optimalisasi Pendampingan Implementasi DAK
7. Penyelarasan dan akselerasi pengelolaan Dapodik PAUD dan Dikmas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan PAUD dan Dikmas
8. Pendampingan dalam pelaksanaan survei lingkungan belajar
9. Rapat Koordinasi Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas
10. Penyelarasan dan akselerasi Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2022
11. Pendampingan pemanfaatan platform sumber daya sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar
12. Sinkronisasi dan Penyelarasan Transformasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
13. Diseminasi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan BGP Provinsi Sumatera Selatan (sebelumnya adalah BP PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan) tentang keterlaksanaan program tahun 2022;
2. Melakukan sosialisasi kepada bidang PAUD Dikmas di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pokja Bunda PAUD, IGTKI, HIMPAUDI, dan pihak lain tentang perubahan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya tidak mencakup PAUD, namun seiring terbitnya Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 mencakup bidang PAUD dan Dikmas;

3. Melakukan inisiasi percepatan kolaborasi dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan PAUD.

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif program lembaga dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pihak lainnya;
2. Melaksanakan program dan kegiatan dengan mengkombinasikan metode daring dan luring;
3. Melakukan kampanye publik program-program lembaga melalui media laman lembaga, dan media sosial lembaga;
4. Bersama Direktorat PAUD melakukan pendampingan pelaksanaan program Lingkungan Belajar Berkualitas di 9 kabupaten/kota sasaran;
5. Bersama Direktorat PAUD melakukan pendampingan pelaksanaan Program Kesiapan Bersekolah di 9 kabupaten/kota sasaran;
6. Bersama Direktorat PAUD melakukan pendampingan melekat terhadap implementasi survei lingkungan belajar di sekolah penggerak jenjang PAUD.



IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Target, Realisasi dan Capaian

Target kinerja “Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)” BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 25% atau sebanyak 4 prov/kab/kota meningkat rapor pendidikannya. Berdasarkan perhitungan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya (pada tahun 2022 berdasarkan data akreditasi tahun 2021-2022) diperoleh realisasi sebesar 100% atau sebanyak 18 prov/kab/kota meningkat rapor pendidikannya, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 400% yang berarti melampaui target renstra dan perjanjian kinerja tahun 2022, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.4 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 Tahun 2022

Untuk menghitung capaian kinerja IKK 1.2. menggunakan rumus perhitungan berikut.

$$IKK\ 1.2 = \sum_{i=1}^n flag(\Delta_i)$$

Keterangan :

1. i : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP Provinsi Sumatera Selatan (1 provinsi dan 17 kab/kota)
2. $flag(\Delta_i)$: Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

IKK 1.2 dihitung berdasarkan jumlah prov/kab/kota di BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran berdasarkan pembobotan pada kenaikan kategori akreditasi satuan dikdas dan dikmen di prov/kab/kota pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Data akreditasi akreditasi satuan dikdas dan dikmen di prov/kab/kota tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.3 Data Akreditasi Satuan Dikdas dan Dikmen Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021**

Prov/Kab/Kota	Tahun 2021							
	A	B	C	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Tidak diisi	Belum Terakreditasi	Total
Kab. Banyuasin	61	358	174	0	5	42	0	640
Kab. Empat Lawang	7	100	80	0	0	35	0	222
Kab. Lahat	32	226	104	0	0	15	0	377
Kab. Muara Enim	53	285	81	0	1	42	0	462
Kab. Musi Banyuasin	109	365	114	0	7	48	0	643
Kab. Musi Rawas	66	213	68	0	1	40	0	388
Kab. Musi Rawas Utara	20	91	33	0	0	16	0	160
Kab. Ogan Ilir	28	187	103	0	2	29	0	349
Kab. Ogan Komering Ilir	56	343	181	0	3	25	0	608
Kab. Ogan Komering Ulu	40	150	43	0	3	32	0	268
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	21	147	154	0	0	26	0	348
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	51	285	77	0	1	74	0	488
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	11	76	54	0	6	28	0	175
Kota Lubuk Linggau	34	67	16	0	1	28	0	146
Kota Pagar Alam	16	57	20	0	1	16	0	110
Kota Palembang	216	242	79	0	3	49	0	589
Kota Prabumulih	32	64	14	0	0	13	0	123
Prov. Sumatera Selatan	287	334	201	0	13	126	1	962

Sumber data: BAN PAUD dan PSKP BSKAP

**Tabel 3.4 Data Akreditasi Satuan Dikdas dan Dikmen Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022**

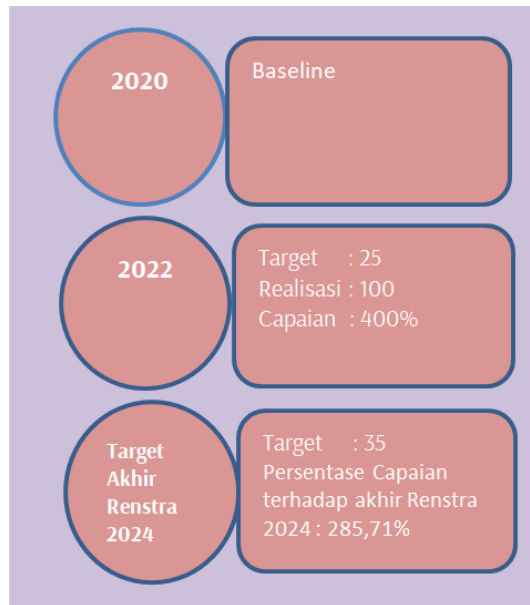
Prov/Kab/Kota	Tahun 2022							
	A	B	C	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Tidak diisi	Belum Terakreditasi	Total
Kab. Banyuasin	62	375	182	0	5	20	0	644
Kab. Empat Lawang	13	122	84	0	0	3	0	222
Kab. Lahat	29	236	109	0	0	3	0	377
Kab. Muara Enim	51	313	89	0	1	11	0	465
Kab. Musi Banyuasin	114	388	124	0	4	21	0	651
Kab. Musi Rawas	71	238	75	0	1	3	0	388
Kab. Musi Rawas Utara	22	102	35	0	0	3	0	162
Kab. Ogan Ilir	26	206	109	0	2	11	0	354
Kab. Ogan Komering Ilir	53	364	184	0	3	12	0	616
Kab. Ogan Komering Ulu	39	177	47	0	3	4	0	270
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	23	159	161	0	0	4	0	347
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	53	337	88	0	1	8	0	487
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	14	88	57	0	5	15	0	179
Kota Lubuk Linggau	46	75	16	0	1	8	0	146
Kota Pagar Alam	20	51	22	0	0	7	0	100
Kota Palembang	234	256	81	0	4	29	0	604
Kota Prabumulih	33	71	14	0	0	6	0	124
Prov. Sumatera Selatan	309	368	212	0	10	80	0	979

Sumber data: BAN PAUD dan PSKP BSKAP

Selanjutnya dihitung selisih bobot pada tahun 2022 dan tahun 2021 pada kategori akreditasi prov/kab/kota tahun 2021 (Tabel 3.3) dan tahun 2022 (Tabel 3.4), jika selisih bernilai positif diberi flag/tanda 1 yang berarti mutu pembelajaran di prov/kab/kota tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, kemudian jumlah selisih ini dibandingkan dengan jumlah seluruh prov/kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan sehingga diperoleh nilai IKK 1.2 berikut.

**Tabel 3.5 Perhitungan Nilai IKK 1.2 Berdasarkan Kenaikan Mutu Pembelajaran
Prov/Kab/Kota Tahun 2021 dan 2022**

Prov/Kab/Kota	Pembobotan			Flag
	Tahun 2021	Tahun 2022	Selisih	
Kab. Banyuasin	28.42%	29.43%	1.01%	1
Kab. Empat Lawang	22.75%	27.84%	5.09%	1
Kab. Lahat	29.36%	30.09%	0.73%	1
Kab. Muara Enim	29.96%	31.91%	1.96%	1
Kab. Musi Banyuasin	31.00%	32.47%	1.47%	1
Kab. Musi Rawas	30.35%	33.52%	3.17%	1
Kab. Musi Rawas Utara	29.25%	32.07%	2.82%	1
Kab. Ogan Ilir	27.19%	28.66%	1.47%	1
Kab. Ogan Komering Ilir	28.82%	29.46%	0.65%	1
Kab. Ogan Komering Ulu	29.46%	32.78%	3.32%	1
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	24.44%	26.31%	1.87%	1
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	28.03%	32.37%	4.34%	1
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	22.97%	25.89%	2.92%	1
Kota Lubuk Linggau	29.35%	35.38%	6.03%	1
Kota Pagar Alam	28.14%	31.15%	3.01%	1
Kota Palembang	34.73%	36.22%	1.49%	1
Kota Prabumulih	32.93%	35.04%	2.11%	1
Prov. Sumatera Selatan	30.20%	32.19%	1.98%	1
Jumlah prov/kab/kota yang mengalami kenaikan mutu pembelajarannya				18
Jumlah prov/kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan				18
Persentase Kenaikan				100%
Target Capaian IKK 1.2				25%
Realisasi Capaian IKK 1.2				400%



Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Tahun 2020 (Baseline), 2022, dan Renstra 2024

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Advokasi dan Pendampingan ke dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi paskapelaksanaan Asesmen Nasional
2. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru
3. Advokasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Implementasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi
4. Pendampingan Program Sekolah Penggerak (PSP).
5. Optimalisasi Program Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan
6. Optimalisasi Pendampingan Implementasi DAK
7. Penyelarasan dan akselerasi pengelolaan Dapodik Dikdas dan Dikmen dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan Dikdas dan Dikmen
8. Penyelarasan dan akselerasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022
9. Pendampingan pemanfaatan platform sumber daya sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka mengajar
10. Sinkronisasi dan Penyelarasan Transformasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

11. Diseminasi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
12. Pendampingan Optimalisasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Perencanaan Berbasis Data
13. Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi digital sebagai platform kolaborasi di internal BPMP

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inovasi dalam penyampaian informasi program dan kegiatan lembaga dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan;
2. Melakukan akselerasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan platform sumber daya sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka mengajar;
3. Melakukan pendampingan melekat kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait implementasi program prioritas Kemendikbudristek.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memperkuat peran SDM BPMP dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unit utama dan direktorat teknis Kemdikbudristek, serta UPT Kemdikbudristek di Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk menyelaraskan program kegiatan.

Sasaran Kegiatan 2



Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan (SK 2) adalah Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, untuk ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan tingkat ketercapaian dari masing - masing indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.



IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Target, Realisasi dan Capaian

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dengan metoda perhitungan sebagai berikut :

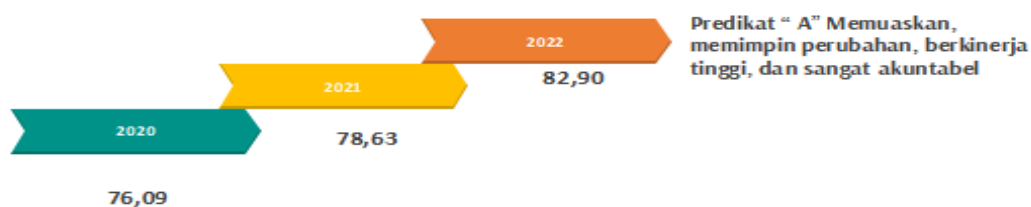
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja]+[Pengukuran kinerja]+[Pelaporan Kinerja]+[Evaluasi Kinerja]

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Setditjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia memperoleh nilai 82,90 **Predikat A**, dengan interpretasi **memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel**. Dengan predikat A ini diperoleh persentase capaian kinerja IKK 2.1 sebesar 100% sehingga realisasi kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi target renstra. Dengan demikian pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi capaian IKK 2.1 dari tahun 2021. Pada tahun 2021 nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebesar 78,36 predikat BB dengan capaian kinerja 83,33%, dan tahun 2022 meningkat menjadi nilai 82,90 predikat A dengan capaian kinerja 100%.



Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 , 2022 dan Target Akhir Renstra 2024

Berikut tingkat implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, 2021, dan 2022.



Gambar 3.6 Tingkat Implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2021, dan 2022

Berikut rincian nilai implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,5
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,6
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	82,90

Faktor pendukung terpenuhinya capaian kinerja IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yaitu renstra, dan perjanjian kinerja;
2. Kegiatan penyusunan rencana kinerja tahunan dan rencana kerja aksi;
3. Kegiatan revaluasi renstra;
4. Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan;
5. Kegiatan pengukuran kinerja per triwulan, dan;
6. Kegiatan penyusunan laporan kinerja.

Untuk perbaikan kedepan masih terdapat faktor penyebab yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan untuk meningkatkan pencapaian nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Satker perlu memastikan dokumen SKP yang diunggah telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai menggambarkan hubungan berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) dibuktikan dengan disusunnya matriks peran hasil;
2. Satker perlu memberikan informasi mengenai tata cara pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi).



IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Target, Realisasi dan Capaian

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah kinerja anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah “97,54” diperoleh dari:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = [60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$$



Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Target Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-KL Tahun 2022 yang tercantum pada Renstra BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebesar 83, dan memperoleh nilai realisasi sebesar 97,54, sehingga didapat persentase capaian kinerja sebesar 117,52% sehingga secara prinsip BPMP Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022 telah memenuhi target capaian IKK 2.2.

Realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebagai berikut.



Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021, 2022, dan Target Akhir Renstra 2024

Target Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 dengan target renstra 82 dan realisasi 82,51 diperoleh persentase capaian 100,62%, dan pada tahun 2022 dengan target pada renstra sebesar

83 dan realisasi 97,54 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 117,52% sehingga pada tahun 2021 dan 2022 telah melampaui target renstra.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, dimana semua kegiatan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, serta memperkuat tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang bermuara pada peningkatan capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2022 BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT Kemendikbudristek terus meningkatkan pelayanan prima dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM dan perbaikan di berbagai sarana dan prasarana BPMP Provinsi Sumatera Selatan.



B. Capaian Anggaran

B.1 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp26.941.520.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp25.554.960.637 dengan persentase daya serap sebesar 94,85%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, melalui 4 (empat) Rincian Output (RO) dengan rincian penyerapan anggaran berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

KODE	URAIAN	TOTAL			
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	26.941.520.000	25.554.960.637	94,85	1.386.559.363
6397.QDB.750	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7.604.965.000	7.275.871.674	95,67	329.093.326
2005.EBA.962	Layanan Umum	230.566.000	192.692.700	83,57	37.873.300
2005.EBA.994	Layanan Perkantoran	18.911.555.000	17.893.091.252	94,61	1.018.463.748
2005.EBB.951	Layanan Sarana Internal	194.434.000	193.305.011	99,42	1.128.989

B.2 Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 94,85%, konsistensi terhadap rencana penarikan dana sebesar 99,37%, capaian output sebesar 147%, dan efisiensi anggaran sebesar 20%, dengan demikian terdapat nilai efisiensi anggaran. Adapun rumus untuk menghitung nilai efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi}/20) \times 50$$

Berdasarkan rumus di atas, maka pada tahun 2022 diperoleh persentase nilai efisiensi anggaran sebesar 100%.

Ketercapaian target indikator kinerja dapat dilihat dari faktor keberhasilan BPMP Provinsi Sumatera Selatan diantaranya adalah:

1. adanya efisiensi anggaran dengan optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan paket meeting;
2. identifikasi pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan mekanisme pelaksanaan secara luring dan daring.

Anggaran hasil efisiensi digunakan/dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume output dari kegiatan dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 1.2 yaitu persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dengan berbagai kegiatan seperti dibawah ini.

1. Audiensi Penjaminan Mutu Pendidikan Ke Pemerintah Daerah;
2. Penguatan Program PAUD, Dikdas dan Dikmen'
3. Pemantauan dan Evaluasi Program dan Evaluasi Program PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN Tahun 2022.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

C.1 Inovasi

Pada tahun 2022, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan inovasi sebagai berikut.

1. Inovasi Media Internalisasi dan edukasi sederhana informasi dan mengukur pemahaman pegawai terhadap program - program BPMP (INTEGRAL)

Internalisasi dan Edukasi Program serta Layanan (Integral)

Masalah:

1. Program-program yang dibebankan ke BPMP banyak dan bersifat dinamis
2. Belum semua pegawai BPMP memahami program-program yang dikawal BPMP
3. Waktu untuk diseminasi/sosialisasi susah dicari momen yang pas

Inovasi:

perlu adanya media internalisasi dan edukasi yang sederhana namun menyenangkan untuk memberikan informasi awal sekaligus mengukur pemahaman pegawai terhadap tema kuis

Tema Integral:

- Core Value ASN "BerAKHLAK" dan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa"
- Reform ZIWBK
- Permenpan no 6 thn 2022 ttg pengelolaan kinerja pegawai ASN
- Gratifikasi
- Program Inovasi Lembaga
- Proses Bisnis Lembaga, POS dan

Dampak:

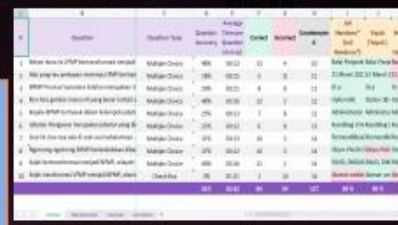
1. tersedianya data pengukuran pemahaman pegawai terhadap tema kuis;
2. pegawai teredukasi dengan metode yang menyenangkan;
3. terselenggaranya pemberian reward bagi peserta terbaik

Bukti:

Data pemahaman pegawai



tampilan quizizz



2. Inovasi Layanan Asesmen Diagnostik Psikologi (LADIPSI)

Layanan Asesmen Diagnostik Psikologi (LADIPSI)

Masalah:

1. Adanya kendala dinas maupun satuan pendidikan dalam melakukan pemetaan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia maupun peningkatan kompetensi lulusan
2. Perlunya pengukuran psikologi dan manajemen perilaku untuk pengembangan kapasitas SDM internal BPMP dan mitra kerja pendidikan

Inovasi

1. Memfasilitasi dinas pendidikan dalam melakukan pemetaan awal bagi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di satuan pendidikan serta uji potensi dan kompetensi bagi PTK untuk proses seleksi, promosi, dan evaluasi SDM.
2. Melaksanakan asesmen psikologi bagi pegawai BPMP dan mitra kerja pendidikan

Jenis Layanan:

CBT/PBT Bakat dan Minat
 CBT/PBT Kesiapan Belajar
 CBT/PBT Gaya Belajar
 CBT/PBT Profil Pelajar Pancasila
 CBT/PBT Uji Potensi dan Kompetensi PTK
 CBT/PBT Uji Potensi Manajerial dan Sosiokultural PNS

Bukti:

1. Data pengguna layanan (48 instansi/satuan pendidikan);
2. Tersedia hasil pengukuran layanan psikologi



MAN IC OKI



SMAN 1 Kisam Tinggi OKU Selatan

3. Inovasi pemanfaatan “WAG PERWALIAN” sebagai media komunikasi dengan pemerintah daerah (WAK DIN)

Inovasi “Perwalian Komunikasi Dinas” melalui “WAK DIN”

Masalah:
Sering terlambatnya informasi, permasalahan pendidikan di daerah lambat direpson, komunikasi yang tersendat, Pergantian pejabat di Daerah juga sering tidak ketahui.

Inovasi:
Memanfaatkan Media Sosial (WAG Perwalian) dan media komunikasi lainnya untuk memberikan informasi cepat tersampaikan dan cepat ditindaklanjuti.. isu-isu strategis cepat terselesaikan selain melalui kegiatan audiensi dengan bupati/walikota/kepala dinas pendidikan



C.2 Penghargaan

Pada tahun 2022, BPMP Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan atas keberhasilan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



C.3 Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa program *crosscutting/collaborative* diantaranya:

1. Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tim Komisi X DPR RI terkait Pembelajaran Tatap Muka dan Program Sekolah Penggerak pada tanggal 13 Juni 2022 di Kota Palembang.

Adapun pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting/collaborative* ini adalah Tim Komisi X DPR RI, Pemerintah Kota Palembang, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek, Tim Komisi IV DPRD Kota Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Koordinator/Korwas TK,SD,SMP/Korwil; Ketua PGRI Kota Palembang, Ketua KKKS/MKKS/KKG/IGTK/HIMPAUDI Kota Palembang; Kepala Sekolah dan Guru Penggerak Kota Palembang; Perwakilan Kepala Sekolah TK/SD/SMP Kota Palembang; dan Perwakilan Komite Sekolah.

Pada program *crosscutting/collaborative* ini BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen bertugas memastikan implementasi kebijakan program prioritas Kemendikbud Ristek di daerah, memantau penyelenggaraan perkembangan Pembelajaran Tatap Muka secara terbatas di daerah dan pemantauan kesiapan pemerintah daerah Kota Palembang dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sesuai Kepmendikbud RI Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, dan mendampingi Tim Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dampak dari program *crosscutting/collaborative* yang dilaksanakan di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan adalah adanya penguatan pemahaman pemerintah daerah terhadap program prioritas Kemendikbud Ristek terutama tentang Program Sekolah Penggerak (PSP) yang sebelumnya telah dilaksanakan MoU penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Pemerintah Daerah berikut.



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

NOMOR : 03.3/II/NK/2021

NOMOR : 420/0012/SMA.1/DISDIK.SS/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 23..., bulan 3... tahun dua ribu dua puluh satu (2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR MAKARIM** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 11857/c/HK-Q2.06/2021

Nomor : 420/0281/SMA.1/Disdik.ss/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh, bulan delapan tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JUMERI** : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. H. Riza Fahlevi, M.M** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai nomor 47 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

2. Audiensi dan Kunjungan Kerja Pimpinan Kemdikbud Ristek terkait Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Palembang

Kemdikbudristek melalui Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, melakukan audiensi secara langsung dengan Pemerintah Kota Palembang, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Pejabat Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pengawas dan Kepala Sekolah pelaksana kurikulum merdeka jenjang PAUD/SD/SMP/SMA.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menjelaskan beberapa miskonsepsi yang terjadi terkait implementasi Kurikulum Merdeka, sekaligus membahas secara detail strategi yang bisa dilakukan satuan pendidikan dalam

mensukseskan implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk keaktifan dalam mengakses Platform Merdeka Mengajar, mengikuti webinar series, bergabung dengan komunitas belajar, dan sebagainya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, pada sambutannya menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah terkait *loss learning* yang terjadi sebagai dampak pandemi Covid 19.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Palembang, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palembang sangat menyambut baik dan mendukung gagasan Mendikbudristek atas Kurikulum Merdeka sebagai perubahan paradigma kurikulum yang terbentuk karena kondisi yang ada dan suatu percepatan di dunia pendidikan demi mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

Setelah acara audiensi, dilanjutkan kunjungan ke beberapa sekolah penyelenggara kurikulum merdeka jalur mandiri diantaranya TK Pesona Bunda, SD Plus IGM, SMP Negeri 20 Palembang, dan SMA Negeri 17 Palembang.

3. **Konsensus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota**

Konsensus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkomitmen mendukung keberlanjutan implementasi program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2023 s.d. Tahun 2024, yaitu:

- Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
- Program Sekolah Penggerak (PSP)
- Perencanaan Berbasis Data (PBD)
- DAK Fisik dan DAK Nonfisik (BOS dan BOP)
- Kebijakan Merdeka Belajar lainnya

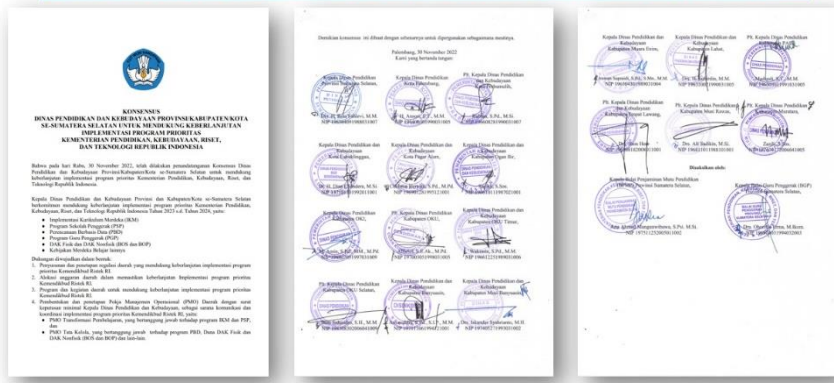
Dukungan diwujudkan dalam bentuk:

1. Penyusunan dan penetapan regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan implementasi program prioritas Kemendikbud Ristek RI.
2. Alokasi anggaran daerah dalam memastikan keberlanjutan Implementasi program prioritas Kemendikbud Ristek RI.
3. Program dan kegiatan daerah untuk mendukung keberlanjutan implementasi program prioritas Kemendikbud Ristek RI.

4. Pembentukan dan penetapan Pokja Manajemen Operasional (PMO) Daerah dengan surat keputusan minimal Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai sarana komunikasi dan koordinasi implementasi program prioritas Kemendikbudristek RI, yaitu:
 - a. PMO Transformasi Pembelajaran, yang bertanggung jawab terhadap program IKM dan PSP, dan
 - b. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab terhadap program PBD, Dana DAK Fisik dan DAK Nonfisik (BOS dan BOP) dan lain-lain.

KEMITRAAN, KOLABORASI, DAN DUKUNGAN PEMDA

KONSSENSUS KEPALA DINAS PENDIDIKAN SE SUMATERA SELATAN



4. Pembentukan dan Penetapan Pokja Manajemen Operasional (PMO) Daerah di Provinsi dan 17 kabupaten/kota sebagai tindak lanjut hasil konsensus.

SK PMO Daerah Dok lengkap di <https://s.id/skpmosumsel>



BAB IV | PENUTUP

A. Kesimpulan

BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran kegiatan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan data yang ada, pada rentang 2020-2022 kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki trend yang terus meningkat, sementara serapan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki trend yang kurang lebih sama, *fluktuatif*.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas terkait persentase capaian kinerja fisik dan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan persentase capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 254,63% dan penyerapan anggaran sebesar 94,85%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja fisik pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan” sebesar 400,51% dengan rincian:
 - ✓ IKK 1.1 persentase capaian kinerja sebesar 401,02%;
 - ✓ IKK 1.2 persentase capaian kinerja sebesar 400%.
2. Persentase capaian kinerja fisik sasaran kegiatan “Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel” sebesar 108,76% dengan rincian:
 - ✓ IKK 2.1 persentase capaian kinerja sebesar 100%;
 - ✓ IKK 2.2 persentase capaian kinerja sebesar 117,52%.

B. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran di BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan tugas dan fungsi LPMP menjadi BPMP di pertengahan tahun;
2. Program Peningkatan mutu pendidikan belum optimal;
3. Persentase anggaran yang mendukung IKK nilainya lebih kecil dibandingkan anggaran manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
4. Penerbitan data mutu yang tidak selaras dengan penyusunan program kerja di daerah;

5. Komitmen daerah dan satuan pendidikan untuk memanfaatkan data mutu sebagai dasar perencanaan program belum optimal;
6. Pemanfaatan platform sumber daya sekolah oleh satuan pendidikan belum optimal.

Langkah Kerja Ke Depan

Beberapa langkah kerja ke depan yang perlu dirumuskan antara lain adalah:

1. Menciptakan program-program inovasi menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi BPMP dalam mengimplementasikan program kerja;
2. Meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM untuk mendukung implementasi tugas pokok dan fungsi BPMP serta menyesuaikan program yang akan dilaksanakan;
3. Sinkronisasi program peningkatan mutu pendidikan antara pusat dan daerah;
4. Mendorong agar persentase anggaran yang mendukung IKK lebih besar dan berimbang dengan anggaran manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
5. Mendorong agar data mutu bisa terbit tepat waktu;
6. Sosialisasi, advokasi, dan pendampingan program perencanaan berbasis data;
7. Memprioritaskan atau mendahulukan melaksanakan program dan kegiatan yang tidak menunggu juknis dari pusat.
8. Melakukan pendampingan melekat terhadap program-program prioritas Kemendikbudristek.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Suyato, M.AP.

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Indralaya, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan



Jumeri, S.TP.,M.Si.



Drs. Suyato, M.AP.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 4.954.998.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 21.210.263.000
		TOTAL	Rp. 26.165.261.000

Indralaya, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan



Jumeri, S.TP., M.Si.



Drs. Suyato, M.AP.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Indralaya, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan,



Iwan Syahril



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.604.965.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.336.555.000
		TOTAL	Rp. 26.941.520.000

Indralaya, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan,



Iwan Syahril



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.

Pengukuran Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian 2022
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	3.93	401%
	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	100	400%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A	A	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	83	97,54	117,52%



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711)581368 Laman : <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan, 30
Januari 2023
Ketua Tim Reviu,

Ahmad Riduan, S.E., M.Acc
NIP. 198007172002121005



#bpmpprovsumseltetapmelayanidenganhati